



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

Jl. Jaksanaranata , Bale Endah,
Kab. Bandung 40375
Tlp. (022) 5940791 Fax.
(022)5940654
Website :
www.pn.balebandung.go.id
E-mail :
pn.balebandung@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirohiim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmad dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat terselesaikannya Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A ini.

Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung No: 6889/KPT.W11-U/OT1.2/XI/2023 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Dengan selesainya Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tersebut, maka diharapkan agar dalam pelaksanaan tugasnya terwujud suatu ketentuan yang jelas dan tegas tentang apa dan bagaimana tata cara administrasi peradilan khususnya pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin serta transparansi dalam penegakan hukum.

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berharap agar nantinya apa yang menjadi kendala dan harapan dari kinerja Pengadilan sebagai garda terdepan Mahkamah Agung RI, mendapat perhatian dan ditindak lanjuti. Dan semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dibidangnya masing-masing serta sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam mewujudkan reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Baleendah, 29 Desember 2023

KETUA

PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A



RENDRA YOZAR DHARMA PUTRA, SH.,MH.

NIP. 197012081996031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
BAB II KEADAAN PERKARA TAHUN 2023.....	17
A. KEADAAN PERKARA.....	17
1. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT PERTAMA.....	17
2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING	21
3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI.....	24
4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI	26
5. KEADAAN PERKARA TINGKAT GRASI	27
B. PENYELESAIAN PERKARA	27
1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS	27
2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU	28
3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK.....	28
4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI	28
5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI	29
C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)	29
1. POSBAKUM	29
2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU.....	29
3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)	30
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	31
KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA	31
A. MUTASI	33
B. PROMOSI	34
C. PENSIUN.....	34
D. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT).....	35
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	36
A. PENGELOLAAN KEUANGAN.....	36
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA.....	39
C. TEKNOLOGI INFORMASI DAN LAYANAN PUBLIK	42
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	46
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU.....	46
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).....	48

C. INOVASI PELAYAN PUBLIK	49
BAB VI PENGAWASAN DAN PENGADUAN.....	52
A. INTERNAL.....	52
B. EVALUASI	53
BAB VII PENUTUP	54
A. KESIMPULAN	54
B. REKOMENDASI	54

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI bahwa setiap satuan kerja diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya secara berjenjang kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi sebagai koordinator di wilayah masing-masing.

Penyampaian laporan dapat dikatakan sebagai salah satu bagian dari kegiatan manajemen yaitu sebagai sarana fungsi pengawasan (*controlling*). Artinya laporan sebagai hasil dari penelaahan pelaksanaan kegiatan selama periode tertentu dijadikan sebagai acuan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan/ penentu kebijakan guna pelaksanaan kegiatan periode yang akan datang.

Tahapan penyusunan laporan dimulai dari tahapan persiapan berupa monitoring yaitu pengumpulan data laporan dan penyelarasan dengan pedoman pelaksanaan kegiatan. Tahap selanjutnya adalah dilakukan evaluasi atas data yang masuk termasuk didalamnya tantangan dan kendala yang dihadapi dilapangan. Kemudian tahap terakhir adalah penyusunan dalam bentuk laporan.

B. SEJARAH

Adapun lokasi bangunan Pengadilan Negeri Bale Bandung beralamat di Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung dengan Luas Tanah adalah 5885 m² dengan sertifikat Nomor : 4218/90 (Hak Guna Pakai)

Pada tahun 1980 Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat mendapat alokasi dana melalui APBN tahun 1980 nomor : 90/XIII/3/1980 tanggal 18 Maret 1980 yang peruntukannya adalah pada pengadaan tanah untuk pembangunan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Dan pada tahun 1982 dengan menggunakan anggaran APBN pula dibangun Kantor Pengadilan Negeri Bale

Bandung dengan Luas Bangunan adalah 624 M2 dengan biaya seluruhnya adalah sebesar Rp. 56.893.000,- (limapuluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Kemudian pada tahun 1986, Pengadilan Negeri Bale Bandung memperluas lahan / tanah sebesar 400 M2 yang sumber perolehannya menggunakan anggaran APBN tahun 1985 yaitu DIP Nomor 075/XIII/3/1985 tanggal 11 Maret 1985 sebesar Rp. 75.059.000,- (tujuh puluh lima juta limapuluh sembilan ribu rupiah)

Pengadilan Negeri Bale Bandung terletak + 25 Km dari Kota Bandung (sebelah selatan Kota Bandung). Letak kantor pemerintahan Kabupaten Bandung pada awal tahun 1980 masih berada di Bale Endah, namun pada tahun 1986 Kabupaten Bandung mengalami musibah Banjir besar dengan meluapnya sungai Citarum yang pada saat itu mengakibatkan terendamnya daerah Wilayah Bale Endah yang mencapai kedalaman antara 2 s/d 3 Meter, dan setelah kejadian musibah tersebut maka ibu kota Kabupaten Bandung dipindahkan ke arah Barat yaitu ke daerah Soreang sedangkan untuk Pengadilan Negeri tetap menempati tempat semula yaitu di Wilayah Kecamatan Bale Endah.

Kemudian pada tahun 1997 Pengadilan Negeri Bale Bandung memperluas bangunan gedung kantor seluas 300 m2 dengan menggunakan anggaran biaya APBN Nomor 050/XIII/3/1996 tertanggal 30 Maret 1996

Pada saat itu Pengadilan Negeri Bale Bandung menyandang predikat Klas II A, namun dengan seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk Kabupaten Bandung Serta banyaknya jumlah perkara yang masuk maka Pengadilan Negeri Bale Bandung telah dipercaya untuk menyandang predikat Pengadilan Negeri Klas I B.

Pada tahun 2004, Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengajukan peningkatan Klas I B untuk menjadi Klas I A kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Nomor Surat: W8.D0.PL.02.01-514 tertanggal 15 April 2004 Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat menindak lanjuti usulan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang usul peningkatan klas pengadilan dimaksud kepada Mahkamah Agung dengan nomor surat : W.18.DA.111-02.01-909 tertanggal 26 April 2004 perihal Peningkatan Klas I B Pengadilan Negeri Bale Bandung menjadi Klas I A.

Usulan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah mengusulkan pula peningkatan Klas Pengadilan Negeri Bale Bandung dari Klas I B menjadi Klas I A kepada MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA di Jakarta dengan Surat Nomor : KMA/262/VII/2005 tertanggal 22 Juli 2005.

Pada tanggal 13 Mei 2009 dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 021/SEK/SK/V/2009 tentang peningkatan kelas pada 11 (Sebelas) Pengadilan Negeri Kelas II (Dua), menjadi Kelas IB dan I (Satu) Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Kelas IA (Yaitu Pengadilan Bale Bandung).

C. WILAYAH HUKUM

Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung merupakan salah satu unit pelaksana Teknis dilingkungan Peradilan umum Mahkamah Agung RI, yang merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman Adapun Tugas Pokok Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung sebagai berikut :

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan undang-undang no. 84 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum

Pengadilan Negeri Kelas IA masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Barat (Bandung), dan daerah hukum nya meliputi wilayah:

1. Kabupaten Bandung



Kabupaten Bandung adalah Daerah Tk. II bagian dari Provinsi Jawa Barat, yang terletak pada suatu dataran tinggi diantara 6°41' - 7°19' Lintang Selatan dan diantara 107°22' - 108°5' Bujur Timur pada ketinggian antara 110 m sampai dengan 2429 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah meliputi 309.207,93 Hektar. Letak daerah ini sangat strategis, bias ditempuh dari Ibu Kota Negara (Jakarta) hanya 2 jam saja, bahkan dengan pesawat terbang hanya memakan waktu 30 menit.

Saat ini wilayah Kabupaten Bandung mempunyai 7 wilayah (setelah diambil oleh wilayah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 15 Kecamatan) yaitu terdiri dari 30 Kecamatan, diantaranya:

- Terdiri dari 7 wilayah, yaitu
 - Wilayah I : Cileunyi
 - Wilayah II : Margahayu
 - Wilayah III : Banjaran
 - Wilayah IV : Cicalengka
 - Wilayah V : Ciparay
 - Wilayah VI : Majalaya
 - Wilayah VII : Soreang
- Terdiri dari 30 Kecamatan, yaitu :
 - Kecamatan Cileunyi = 6 Desa
 - Kecamatan Cimenyan = 9 Desa
 - Kecamatan Cilengkrang = 6 Desa
 - Kecamatan Bojongsoang = 6 Desa
 - Kecamatan Margahayu = 5 Desa
 - Kecamatan Margaasih = 6 Desa
 - Kecamatan Katapang = 10 Desa
 - Kecamatan Dayeuh kolot = 5 Desa + 1 Kelurahan
 - Kecamatan Banjaran = 11 desa
 - Kecamatan Pameungpeuk = 6 desa
 - Kecamatan Pangalengan = 13 Desa
 - Kecamatan Arjasari = 11 Desa
 - Kecamatan Cimaung = 9 desa
 - Kecamatan Cicalengka = 12 Desa

- Kecamatan Cikancung = 9 Desa
- Kecamatan Rancaekek = 13 Desa
- Kecamatan Nagrek 6 Desa
- Kecamatan Ciparay 14 Desa
- Kecamatan Pacet = 12 Desa
- Kecamatan Kertasari = 7 Desa
- Kecamatan Bale Endah = 5 Kelurahan 3 Desa
- Kecamatan Majalaya = 11 Desa
- Kecamatan Paseh = 12 Desa
- Kecamatan Ibun = 12 Desa
- Kecamatan Solokan Jeruk = 7 Desa
- Kecamatan Soreang = 18 Desa
- Kecamatan Pasir Jambu = 10 DeSa
- Kecamatan Ciwidey = 7 Desa
- Kecamatan Rancabali = 5 Desa
- Kecamatan Cangkuang = 7 Desa

2. Kota Cimahi



Kondisi Geografis Secara, geografis, Cimahi terletak pada 107° 36 bujur timur dan 55' lintang selatan keadaan tanah di Cimahi umumnya subur karena hampir seluruh daerah mengandung endapan vulkanis yang disebut LATOSOL, ALUVIAT dan lain-lain. Curah hujan rata-rata 163 MM dengan rata-rata hujan 20 hari setiap bulannya. Cimahi terletak pada ketinggian + 700 - 1100 M diatas permukaan air laut. Suhu udaranya berkisar diantara 18-22°C dengan penyesuaian turunnya suhu 0,5°C setiap naiknya ketinggian tempat 100 M dengan demikian Cimahi termasuk kategori daerah beriklim sedang.

Kota Cimahi Mempunyai 3 wilayah kecamatan 15 kelurahan

- Kecamatan Cimahi Utara = 4 kelurahan
 - Kelurahan Cibabat
 - Kelurahan Citeureup
 - Kelurahan Pasirkaliki
 - Kelurahan Cipageuran
- Kecamatan Cimahi Tengah = 6 kelurahan
 - Kelurahan Cimahi
 - Kelurahan Setiamanah
 - Kelurahan Karang Mekar
 - Kelurahan Paclasuka
 - Kelurahan Baros
 - Kelurahan Cigugur Tengah
- Kecamatan Cimahi Selatan = 5 kelurahan
 - Kelurahan Cibeureum
 - Kelurahan Lewigajah
 - Kelurahan Utama
 - Kelurahan Melong
 - Kelurahan Cibeber

Sebagai salah satu wilayah pembangunan dan pusat kegiatan di kabupaten Bandung waktu itu, Cimahi diarahkan untuk berfungsi sebagai kota : Pendidikan militer, pusat perdagangan dan jasa, daerah industri serta pemukiman perumahan sekaligus diarahkan sebagai wilayah penyangga

kota Bandung selaku ibu kota propinsi Jawa Barat. Adapun luas wilayah kota Cimahi adalah 4.103.73 Ha, dengan penggunaan lahan sbb

2.1	Pemukiman	1.609	Ha	=	39.21 %
2.2	Lahan militer	375	Ha	=	9.14 %
2.3	Inclustri	700	Ha	=	17.06 %
2.4	Persawahan	326	Ha	=	7.94 %
2.5	Tegalan	382	Ha	=	9.31 %
2.6	Kebun Campur	367	Ha	=	8.94 %
2.7	Pusat Perclagangan	140	Ha	=	3.41 %
2.8	Lain-lain	204.73	Ha	=	4.99 %
	Jumlah	4.103.73	Ha	=	100 %

3. Kab. Bandung Barat



Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat terbentuk atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat mempunyai luas + 36.925,05 Km², secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan system pemerintahan di Indonesia dan system pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di provinsi Jawa Barat yang tersebar di Kabupaten dan Kota memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah. Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan terutama di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya khususnya di Kabupaten Bandung melalui pembentukan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Surat keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor : 11 tahun 2004 tanggal 20 Agustus 2004 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Surat usulan Bupati Bandung Nomor : 135/1729/BINPENUM tanggal 23 Agustus 2004 perihal persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Surat Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 135/Kep.DPRD-7/2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang persetujuan terhadap pembentukan Kabupaten Bandung Barat. Surat Usulan Gubernur Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 135.1/1197/Desen tanggal 11 April 2005 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor : 07 tahun 2005 tanggal 20 Maret 2005 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap penetapan Kecamatan NGAMPRAH sebagai calon Ibu Kota Bandung Barat.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakekat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, social budaya, social politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Kabupaten

Bandung ditata dan dimekarkan dengan membentuk Kabupaten Baru. Dengan terbentuknya Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonom, Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bandung, berkewajiban membina dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan DPRD, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian asset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Induk dan kabupaten yang baru dibentuk. Asset daerah berupa BUMD dan asset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu Kabupaten dapat dilakukan dengan kerjasama antar daerah.

Dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dan swasta dan untuk tujuan efisiensi, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, kesetaraan dan akuntabilitas.

Calon Kabupaten Bandung Barat mempunyai luas wilayah + 1.305,77 Km², terdiri dari

1. Kecamatan Lembang
2. Kecamatan Parongpong
3. Kecamatan Cisarua
4. Kecamatan Cikalong Wetan
5. Kecamatan Cipeundeuy
6. Kecamatan Ngamprah
7. Kecamatan Ciapatat
8. Kecamatan Padalarang
9. Kecamatan Batujajar
10. Kecamatan Cihampelas
11. Kecamatan Cililin
12. Kecamatan Cipongkor
13. Kecamatan Rongga
14. Kecamatan Sindang Kerta
15. Kecamatan Gunung Halu

Batas wilayah Kabupaten Bandung Barat terhadap daerah lainnya, yaitu

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Cikalong Kulon (Kabupaten Cianjur), Kecamatan Maniis, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa,

Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Sagalaherang, Kecamatan Jalan Cagak, Kecamatan Cislak (Kabupaten Subang)

2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Soreang (Kabupaten Bandung), Kecamatan Cidadap, Kecamatan Sukasari, Kecamatan (Kota Madya Bandung), Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Tengah, Kecamatan Selatan (Kota Cimahi)
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Ciwidey dan Kecamatan Rancabali (Kabupaten Bandung) dan Kecamatan Pagelaran (Kabupaten Cianjur)
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Ciranjang, dan Kecamatan Mande (Kabupaten Cianjur)

D. VISI, MISI, DAN NILAI UTAMA

Sesuai dengan cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010-2035 Mahkamah Agung RI, Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai berikut :

Visi Pengadilan Negeri Bale Bandung :

“Terwujudnya Badan Peradilan pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang Agung.”

Misi Pengadilan Negeri Bale Bandung :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai Utama Pengadilan Negeri Bale Bandung yaitu :

CITARUM (Cerdas Independen Transparan Akuntabel Responsif Unggul Mandiri)

E. Kebijakan Umum Peradilan

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A merupakan Instansi Vertikal di bawah Lembaga Tinggi Negara Bidang Yudikatif Mahkamah Agung RI yang berkedudukan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama

dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama serta Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berpedoman pada arah kebijakan Mahkamah Agung yang diantaranya tertuang dalam cetak biru Pembaruan Peradilan yang ditargetkan tahun 2010-2035.

Dalam cetak biru tersebut diuraikan beberapa arahan yang akan dicapai oleh badan peradilan Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya. Arahan-arahan tersebut adalah:

1. Arahan pembaruan fungsi teknis dan manajemen perkara
2. Arahan pembaruan fungsi pendukung, meliputi :
 - a. Pembaruan Fungsi Penelitian Dan Pengembangan
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
 - c. Pembaruan Sistem Pendidikan Dan Pelatihan
 - d. Pembaruan Pengelolaan Anggaran
 - e. Pembaruan Pengelolaan Aset
 - f. Pembaruan Teknologi Informasi
3. Arahan pembaruan akuntabilitas, baik pembaruan sistem pengawasan maupun keterbukaan informasi.

Dalam cetak biru tersebut juga diformulasikan visi dan misi untuk tahun 2010-2035. Visi Mahkamah Agung adalah "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung". Misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung dalam rangka mencapai visi dan misi dalam cetak biru pembaruan peradilan tersebut diantaranya adalah dengan mewujudkan Zona Integritas dan WBK serta WBBM di lingkungan Mahkamah Agung dan empat peradilan di bawahnya. Dalam rangka tersebut Mahkamah Agung telah menyusun dan memetakan 6(enam) area perubahan dalam organisasi Mahkamah Agung. Kedelapan area ini akan dilaksanakan hampir bersamaan untuk mencapai tujuan zona integritas. Keenam Area tersebut adalah:

- 1) Area I Manajemen Perubahan
- 2) Area II Penataan Tatalaksana
- 3) Area III Penataan Sistem Manajemen SDM
- 4) Area IV Penguatan Akuntabilitas
- 5) Area V Penguatan Pengawasan
- 6) Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hingga saat ini perubahan yang dirasakan sebagai wujud pelaksanaan perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan struktur pengadilan hingga pengadilan tingkat pertama misalnya seperti dipisahkannya antara Panitera dan Sekretaris; kemudian pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagai wujud pengelolaan organisasi yang modern dengan di terapkannya berbagai aplikasi terpusat yang berbasis web/ jaringan internet. Program menengah Mahkamah Agung Tahun 2022-2024 memiliki beberapa program diantaranya:

- 1) Revolusi mental/perilaku aparatur
- 2) Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung
- 3) Pengembangan Teknologi Informasi
- 4) Penguatan Pengawasan
- 5) Sumber Daya Manusia Aparatur
- 6) Peningkatan Pelayanan Publik

Keenam program tersebut merupakan program unggulan yang menjadi target terlaksananya program Mahkamah Agung 2021 – 2024 dalam rangka mewujudkan tatanan perubahan sikap mental sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai integritas yang tinggi, organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi, birokrasi yang efektif dan efisien, e-government, dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas.

F. STRUKTUR ORGANISASI



BAB II KEADAAN PERKARA TAHUN 2023

A. KEADAAN PERKARA

1. KEADAAN PERKARA DI TINGKAT PERTAMA

Keadaan Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Perdata Gugatan			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa akhir
1	Januari	112	33	18	127
2	Februari	127	24	22	129
3	Maret	129	38	30	137
4	April	137	18	11	144
5	Mei	144	29	27	146
6	Juni	146	29	24	151
7	Juli	151	37	33	155
8	Agustus	155	27	38	144
9	September	144	22	26	140
10	Oktober	140	29	27	142
11	November	142	31	30	143
12	Desember	143	20	34	129

Tabel 2.1 : Keadaan Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023

Keadaan Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam kurun waktu satu tahun sampai tanggal 29 Desember 2023 yaitu sisa perkara sebelumnya pada tahun 2022 sejumlah 112, perkara masuk sejumlah 318, perkara putus sejumlah 294, dan sisa akhir sampai tanggal 29 Desember 2023 sejumlah 136 perkara.

Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Perdata Gugatan Sederhana			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa akhir
1	Januari	5	2	3	4
2	Februari	4	3	5	2
3	Maret	2	2	2	2
4	April	2	1	1	2
5	Mei	2	1	2	1
6	Juni	1	4	-	5
7	Juli	5	2	4	3
8	Agustus	3	5	3	5

9	September	5	4	5	4
10	Oktober	4	4	5	3
11	November	3	7	3	7
12	Desember	7	3	5	5

Tabel 2.2 : Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023

Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam kurun waktu satu tahun sampai tanggal 29 Desember 2023 yaitu sisa perkara sebelumnya pada tahun 2022 sejumlah 5 perkara masuk sejumlah 36, perkara putus sejumlah 34, dan sisa akhir pada Tahun 2023 sejumlah 7 perkara.

Keadaan Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Perdata Permohonan			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa akhir
1	Januari	13	39	30	22
2	Februari	22	35	42	15
3	Maret	15	51	38	28
4	April	28	27	30	25
5	Mei	25	62	52	35
6	Juni	35	40	58	17
7	Juli	17	42	45	14
8	Agustus	14	48	44	18
9	September	18	46	42	22
10	Oktober	22	51	51	22
11	November	22	40	44	18
12	Desember	18	26	31	13

Tabel 2.3 : Keadaan Perkara Perdata Permohonan Di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023

Keadaan Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam kurun waktu satu tahun sampai tanggal 29 Desember 2023 yaitu sisa perkara sebelumnya pada tahun 2022 sejumlah 13, perkara masuk sejumlah 485, perkara putus sejumlah 481, dan sisa akhir sampai tanggal 29 Desember 2023 sejumlah 17 perkara.

Keadaan Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Pidana Biasa			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa akhir
1	Januari	133	90	76	147

2	Februari	147	75	70	152
3	Maret	152	100	57	195
4	April	195	51	80	166
5	Mei	166	133	103	196
6	Juni	196	91	84	203
7	Juli	203	84	100	187
8	Agustus	187	90	113	164
9	September	164	94	96	162
10	Oktober	162	128	80	210
11	November	210	121	136	195
12	Desember	195	79	75	199

Tabel 2.4 : Keadaan Perkara Pidana Biasa

Di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023

Keadaan Perkara Pidana Biasa Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam kurun waktu satu tahun pada Tahun 2023 yaitu sisa perkara sebelumnya pada tahun 2022 sejumlah 133 perkara masuk sejumlah 1082, perkara putus sejumlah 1012, dan sisa akhir sampai tanggal 29 Desember 2023 sejumlah 195 perkara.

Keadaan Perkara Pidana Anak Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Pidana Anak			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa akhir
1	Januari	2	6	3	5
2	Februari	5	1	3	3
3	Maret	3	2	5	0
4	April	0	1	1	0
5	Mei	0	4	0	4
6	Juni	4	1	4	1
7	Juli	1	3	2	2
8	Agustus	2	1	1	2
9	September	2	3	5	0
10	Oktober	0	0	0	0
11	November	0	3	0	0
12	Desember	3	0	0	3

Tabel 2.5 : Keadaan Perkara Pidana Anak

Di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023

Keadaan Perkara Pidana Anak Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam kurun waktu satu tahun sampai tanggal 29 Desember 2023 yaitu sisa perkara sebelumnya pada tahun 2022 sejumlah 2, perkara masuk sejumlah 25, perkara putus sejumlah 24, dan sisa akhir sampai tanggal 29 Desember 2023 sejumlah 4 perkara.

Keadaan Perkara Pidana Singkat Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	Bulan	Pidana Singkat			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa akhir
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-

Tabel 2.6 : Keadaan Perkara Pidana Singkat

Di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023

Keadaan Perkara Pidana Singkat Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam kurun waktu satu tahun sampai tanggal 29 Desember 2023 yaitu sisa perkara sebelumnya pada tahun 2022 sejumlah Nihil, perkara masuk sejumlah Nihil, perkara putus sejumlah Nihil, dan sisa akhir sampai tanggal 29 Desember 2023 sejumlah Nihil perkara.

Keadaan Perkara Pidana Cepat Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Pidana Cepat			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa akhir
1	Januari	0	1	1	0
2	Februari	0	23	23	0
3	Maret	0	1	1	0
4	April	0	1	1	0
5	Mei	0	20	20	0
6	Juni	0	2	2	0
7	Juli	0	4	4	0
8	Agustus	0	9	9	0
9	September	0	78	78	0
10	Oktober	0	62	62	0
11	November	0	0	0	0
12	Desember	0	59	59	0

Tabel 2.7 : Keadaan Perkara Pidana Cepat

Di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023

Keadaan Perkara Pidana Cepat Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam kurun waktu satu tahun sampai tanggal 29 Desember 2023 yaitu sisa perkara sebelumnya pada tahun 2022 sejumlah Nihil, perkara masuk sejumlah 201, perkara putus sejumlah 201, dan sisa akhir sampai tanggal 29 Desember 2023 sejumlah Nihil perkara.

Keadaan Perkara Pidana Lalu-Lintas Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Pidana Lalu-Lintas			
		Sisa	Masuk	Putus	Sisa akhir
1	Januari	0	0	0	0
2	Februari	0	764	764	0
3	Maret	0	244	244	0
4	April	0	0	0	0
5	Mei	0	25	25	0
6	Juni	0	249	249	0
7	Juli	0	1708	1708	0
8	Agustus	0	3871	3871	0
9	September	0	4199	4199	0
10	Oktober	0	4148	4148	0
11	November	0	4192	4192	0
12	Desember	0	3427	3427	0

Tabel 2.8 : Keadaan Perkara Pidana Lalu-Lintas

Di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023

Keadaan Perkara Pidana Lalu-Lintas Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam kurun waktu satu tahun sampai tanggal 29 Desember 2023 yaitu sisa perkara sebelumnya pada Tahun 2023 sejumlah Nihil, perkara masuk sejumlah 19.400, perkara putus sejumlah 19.400, dan sisa akhir sampai tanggal 29 Desember 2023 sejumlah Nihil perkara.

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Putusan Perdata Yang Diajukan Banding pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Perkara Perdata Tingkat Pertama	Tanggal		Ket
		Pengiriman Berkas Banding	Pemberitahuan Putusan Banding	
1	115/Pdt.G/2022/PN Blb	30-03-2023	13-04-2023	BHT
2	116/Pdt.G/2022/PN Blb	16-03-2023	09-06-2023	PK

3	135/Pdt.G/2022/PN Blb	31-01-2023	20-02-2023	BHT
4	99/Pdt.G/2022/PN Blb	23-02-2023	15-05-2023	KASASI
5	104/Pdt.G/2022/PN Blb	16-06-2023	22-08-2023	BHT
6	146/Pdt.G/2022/PN Blb	04-04-2023	03-07-2023	BHT
7	161/Pdt.G/2022/PN Blb	28-03-2023	15-06-2023	BHT
8	270/Pdt.G/2021/PN Blb	04-04-2023	03-07-2023	BHT
9	148/Pdt.G/2022/PN Blb	04-04-2023	03-07-2023	BHT
10	118/Pdt.G/2022/PN Blb	13-03-2023	16-05-2023	BHT
11	102/Pdt.G/2022/PN Blb	21-03-2023	14-06-2023	BHT
12	177/Pdt.G/2022/PN Blb	21-03-2023	10-05-2023	BHT
13	261/Pdt.G/2022/PN Blb	14-04-2023	07-06-2023	KASASI
14	151/Pdt.G/2022/PN Blb	13-04-2023	06-07-2023	BHT
15	201/Pdt.G/2022/PN Blb	17-04-2023	29-05-2023	BHT
16	205/Pdt.G/2022/PN Blb	27-04-2023	13-07-2023	BHT
17	292/Pdt.G/2022/PN Blb	03-05-2023	04-07-2023	BHT
18	215/Pdt.G/2022/PN Blb	09-05-2023	04-07-2023	BHT
19	271/Pdt.G/2022/PN Blb	28-04-2023	08-06-2023	BHT
20	227/Pdt.G/2022/PN Blb	09-05-2023	26-07-2023	Kasasi
21	190/Pdt.G/2022/PN Blb	16-05-2023	20-06-2023	Kasasi
22	182/Pdt.G/2022/PN Blb	16-05-2023	28-07-2023	Kasasi
23	222/Pdt.G/2022/PN Blb	19-06-2023	26-07-2023	KASASI
24	183/Pdt.G/2022/PN Blb	04-07-2023	01-08-2023	KASASI
25	273/Pdt.G/2022/PN Blb	04-07-2023	14-08-2023	Kasasi
26	285/Pdt.G/2022/PN Blb	04-07-2023	08-08-2023	BHT
27	247/Pdt.G/2022/PN Blb	07-07-2023	15-08-2023	BHT
28	233/Pdt.G/2022/PN Blb	12-07-2023	08-08-2023	BHT
29	185/Pdt.G/2022/PN Blb	18-07-2023	04-09-2023	Kasasi
30	207/Pdt.G/2022/PN Blb	18-07-2023	28-08-2023	bht
31	235/Pdt.G/2022/PN Blb	18-07-2023	08-08-2023	Kasasi
32	61/Pdt.G/2023/PN Blb	20-07-2023	24-08-2023	Bht
33	36/Pdt.G/2023/PN Blb	01-08-2023	23-08-2023	Kasasi
34	258/Pdt.G/2022/PN Blb	08-08-2023	05-10-2023	Kasasi
35	287/Pdt.G/2022/PN Blb	16-08-2023	09-10-2023	Bht
36	19/Pdt.G/2023/PN Blb	13-09-2023	17-10-2023	Bht
37	232/Pdt.G/2022/PN Blb	13-09-2023	06-10-2023	Kasasi
38	290/Pdt.G/2022/PN Blb	15-09-2023	31-10-2023	Bht
39	257/Pdt.G/2022/PN Blb	15-09-2023	03-11-2023	Bht
40	297/Pdt.G/2022/PN Blb	21-09-2023	03-11-2023	Bht
41	126/Pdt.G/2023/PN Blb	22-09-2023	01-11-2023	Bht
42	11/Pdt.G/2023/PN Blb	03-10-2023	27-11-2023	
43	223/Pdt.G/2022/PN Blb	03-10-2023	27-11-2023	Kasasi
44	266/Pdt.G/2022/PN Blb	03-10-2023	27-11-2023	Kasasi
45	78/Pdt.G/2023/PN Blb	25-10-2023		Belum Putus
46	204/Pdt.G/2022/PN Blb	23-10-2023	27-11-2023	
47	280/Pdt.G/2022/PN Blb	27-10-2023	14-11-2023	Kasasi

48	70/Pdt.G/2023/PN Blb	02-11-2023	05-11-2023	
49	160/Pdt.G/2023/PN Blb	06-11-2023	04-12-2023	
50	7/Pdt.Plw/2023/PN Blb	09-11-2023		Belum Putus
51	74/Pdt.G/2023/PN Blb	13-11-2023		Belum Putus
52	97/Pdt.G/2023/PN Blb	23-11-2023		Belum Putus
53	61/Pdt.Plw/2021/PN Blb	29-11-2023		Belum Putus
54	95/Pdt.G/2023/PN Blb	27-11-2023		Belum Putus
55	32/Pdt.G/2023/PN Blb	30-11-2023		Belum Putus
56	64/Pdt.G/2023/PN Blb	12-12-2023		Belum Putus
57	30/Pdt.G/2023/PN Blb	15-12-2023		Belum Putus
58	83/Pdt.G/2023/PN Blb	14-12-2023		Belum Putus
59	55/Pdt.G/2023/PN Blb	22-12-2023		Belum Putus
60	93/Pdt.G/2023/PN Blb	27-12-2023		Belum Putus
61	116/Pdt.G/2023/PN Blb			
62	185/Pdt.G/2023/PN Blb			
63	104/Pdt.G/2023/PN Blb			
64	147/Pdt.G/2023/PN Blb			
65	125/Pdt.G/2023/PN Blb			
66	65/Pdt.G/2023/PN Blb			
67	176/Pdt.G/2023/PN Blb			
68	201/Pdt.G/2023/PN Blb			
69	131/Pdt.G/2023/PN Blb			
70	167/Pdt.G/2023/PN Blb			

Tabel 2.9 : Putusan Perdata Yang Diajukan Banding di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023

Putusan Pidana Yang Diajukan Banding pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Perkara Pidana Tingkat Pertama	Tanggal		Ket
		Pengiriman Berkas Banding	Pemberitahuan Putusan Banding	
1.	664/Pid.B/2022/PN Blb	10-1-2023	27-2-2023	
2.	862/Pid.Sus/2022/PN Blb	8-2-2023	13-3-2023	
3.	893/Pid.B/2022/PN Blb	14-4-2023	5-6-2023	
4.	37/Pid.B/2023/PN Blb	27-4-2023	5-6-2023	
5.	61/Pid.B/2023/PN Blb	2-5-2023	12-6-2023	
6.	96/Pid.B/2023/PN Blb	2-5-2023	12-6-2023	
7.	160/Pid.B/2023/PN Blb	4-5-2023	16-6-2023	
8.	74/Pid.B/2023/PN Blb	4-5-2023	4-7-2023	
9.	73/Pid.B/2023/PN Blb	26-4-2023	4-5-2023	DICABUT
10.	99/Pid.Sus/2023/PN Blb	16-5-2023	10-8-2023	
11.	95/Pid.B/2023/PN Blb	16-5-2023	12-6-2023	
12.	987/Pid.Sus/2022/PN Blb	16-5-2023	10-7-2023	
13.	174/Pid.Sus/2023/PN Blb	31-5-2023	10-8-2023	

14.	121/Pid.Sus/2023/PN Blb	13-6-2023	31-8-2023	
15.	861/Pid.Sus/2022/PN Blb	21-6-2023	25-7-2023	
16.	15/Pid.B/2023/PN Blb	20-6-2023	21-7-2023	
17.	16/Pid.B/2023/PN Blb	20-6-2023	21-7-2023	
18.	242/Pid.B/2023/PN Blb	26-6-2023	9-8-2023	
19.	135/Pid.B/2023/PN Blb	-	5-7-2023	DICABUT
20.	187/Pid.Sus/2023/PN Blb	25-7-2023	6-9-2023	
21.	188/Pid.Sus/2023/PN Blb	25-7-2023	6-9-2023	
22.	356/Pid.B/2023/PN Blb	31-7-2023	31-8-2023	
23.	369/Pid.B/2023/PN Blb	15-8-2023	26-9-2023	
24.	515/Pid.Sus/2023/PN Blb	12-9-2023	1-11-2023	
25.	438/Pid.Sus/2023/PN Blb	19-9-2023	16-11-2023	
26.	326/Pid.B/2023/PN Blb	21-9-2023	-	
27.	683/Pid.Sus/2023/PN Blb	23-11-2023		
28.	690/Pid.B/2023/PN Blb	30-11-2023		
29.	684/Pid.B/2023/PN Blb	13-12-2023		
30.	838/Pid.B/2023/PN Blb	14-12-2023		

Tabel 2.10 : Putusan Pidana Yang Diajukan Banding di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Putusan Perdata Yang Diajukan Kasasi pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Perkara Perdata Tingkat Pertama	Tanggal		Ket
		Pengiriman Berkas Kasasi	Pemberitahuan Putusan Kasasi	
1	258/Pdt.G/2021/PN.Blb	10-03-2023	-	Pengiriman berkas
2	55/Pdt.G/2022/PN.Blb	14-02-2023		Pengiriman berkas
3	68/Pdt.G/2022/PN.Blb	03-03-2023		Pengiriman berkas
4	3/Pdt.G/2022/PN.Blb	22-02-2023		Pengiriman berkas
5	209/Pdt.G/2021/PN.Blb	10-03-2023	24-08-2023	BHT
6	48/Pdt.G/2022/PN.Blb	10-03-2023	24-08-2023	BHT
7	215/Pdt.G/2021/PN.Blb	21-03-2023		Pengiriman berkas
8	81/Pdt.G/2022/PN.Blb	13-03-2023	24-08-2023	BHT
9	278/Pdt.Bth/2021/PN.Blb	16-03-2023	-	BHT
10	145/Pdt.G/2021/PN.Blb	21-03-2023	-	Pengiriman berkas
11	186/Pdt.G/2021/PN.Blb	-	-	BHT
12	236/Pdt.G/2021/PN.Blb	05-04-2023	27-09-2023	BHT
13	201/Pdt.G/2021/PN.Blb	27-03-2023	26-09-2023	BHT

14	159/Pdt.G/2022/PN.Blb	17-03-2023	-	Pengiriman berkas
15	259/Pdt.G/2021/PN.Blb	-	-	BHT
16	12/Pdt.G/2023/PN.Blb	04-04-2023	22-05-2023	BHT
17	138/Pdt.G/2022/PN.Blb	18-04-2023	-	Pengiriman berkas
18	89/Pdt.G/2022/PN.Blb	03-05-2023	-	Pengiriman berkas
19	27/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN.Blb	17-05-2023	03-07-2023	BHT
20	43/Pdt.G/2022/PN.Blb	19-05-2023	-	Pengiriman berkas
21	266/Pdt.G/2021/PN.Blb	19-05-2023	-	Pengiriman berkas
22	60/Pdt.G/2022/PN.Blb	16-05-2023		Pengiriman berkas
23	121/Pdt.G/2022/PN.Blb	24-05-2023		Pengiriman berkas
24	153/Pdt.G/2022/PN.Blb	07-06-2023		Pengiriman berkas
25	106/Pdt.G/2022/PN.Blb	22-06-2023		Pengiriman berkas
26	99/Pdt.G/2022/PN.Blb	14-07-2023		Pengiriman berkas
27	261/Pdt.G/2022/PN.Blb	04-08-2023		Pengiriman berkas
28	190/Pdt.G/2022/PN.Blb			Pengiriman berkas
29	118/Pdt.G/2022/PN.Blb			BHT
30	102/Pdt.G/2022/PN.Blb	16-08-2023		Pengiriman berkas
31	148/Pdt.G/2022/PN.Blb	05-09-2023		Pengiriman berkas
32	227/Pdt.G/2022/PN.Blb	15-09-2023		Pengiriman berkas
33	21/Pdt.G/2022/PN.Blb	23-08-2023		Pengiriman berkas
34	182/Pdt.G/2022/PN.Blb	15-09-2023		Pengiriman berkas
35	222/Pdt.Bth/2022/PN.Blb	16-10-2023		Pengiriman berkas
36	183/Pdt.G/2022/PN.Blb	20-09-2023		Pengiriman berkas
37	235/Pdt.G/2022/PN.Blb	13-09-2023		Pengiriman berkas
38	273/Pdt.G/2022/PN.Blb	17-10-2023		Pengiriman berkas
39	36/Pdt.G/2023/PN.Blb	06-10-2023		Pengiriman berkas
40	214/Pdt.G/2023/PN.Blb	21-11-2023		Pengiriman berkas
41	185/Pdt.G/2022/PN.Blb	23-10-2023		Pengiriman berkas
42	129/Pdt.G/2019/PN.Blb	-	-	BHT
43	258/Pdt.G/2022/PN.Blb	12-12-2023		
44	232/Pdt.G/2022/PN.Blb	27-12-2023		
45	223/Pdt.G/2022/PN.Blb	21-12-2023		
46	266/Pdt.G/2022/PN.Blb	05-12-2023		
47	280/Pdt.G/2022/PN.Blb			
48	112/Pdt.G/2021/PN.Blb			
49	204/Pdt.G/2022/PN.Blb			
50	70/Pdt.G/2023/PN.Blb			

Tabel 2.11 : Putusan Perdata Yang Diajukan Kasasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023

Putusan Pidana Yang Diajukan Kasasi pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Ket
----	---------	-----

	Perkara Pidana Tingkat Pertama	Pengiriman Berkas Kasasi	Pemberitahuan Putusan Kasasi	
1.	708/Pid.B/LH/2022/PN Blb	16 – 3 - 2023	14 – 9 - 2023	
2.	915/Pid.B/2022/PN Blb	9 – 3 - 2023	5 – 9 - 2023	
3.	660/Pid.B/2022/PN Blb	8 – 3 - 2023	20 – 7 - 2023	
4.	912/Pid.B/2022/PN Blb	31 – 3 - 2023	26 – 6 - 2023	
5.	913/Pid.B/2022/PN Blb	31 – 3 - 2023	26 – 6 - 2023	
6.	576/Pid.Sus/2022/PN Blb	5 – 4 - 2023	29 – 9 - 2023	
7.	61/Pid.B/2023/PN Blb	-	14 – 8 - 2023	DICABUT
8.	893/Pid.B/2022/PN Blb	17 – 7 - 2023	10 – 10 - 2023	
9.	37/Pid.B/2023/PN Blb	17 – 7 - 2023	-	
10.	248/Pid.B/2023/PN Blb	-	24 – 7 – 2023	TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL
11.	160/Pid.B/2023/PN Blb	20 – 7 - 2023	9 – 11 - 2023	
12.	74/Pid.B/2023/PN Blb	29 – 8 - 2023	9 – 11 - 2023	
13.	861/Pid.Sus/2022/PN Blb	28 – 8 - 2023		
14.	85/Pid.B/LH/2023/PN Blb	21 – 9 - 2023		
15.	188/Pid.Sus/2023/PN Blb	4 – 10 - 2023		
16.	187/Pid.Sus/2023/PN Blb	4 – 10 - 2023		
17.	369/Pid.B/2023/PN Blb	27 – 10 - 2023		
18.	666/Pid.B/2023/PN Blb	14-12-2023		PROSES

Tabel 2.12 : Putusan Pidana Yang Diajukan Kasasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Putusan Perdata Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Perkara Perdata Tingkat Pertama	Tanggal		Ket
		Pengiriman Berkas PK	Pemberitahuan Putusan PK	
1	109/Pdt.G/2020/PN.Blb	11-04-2023		Pengiriman berkas
2	50/Pdt.G/2021/PN.Blb	16-06-2023		Pengiriman berkas
3	256/Pdt.G/2020/PN.Blb	16-06-2023	25-09-2023	
4	248/Pdt.G/2018/PN.Blb	12-07-2023		Pengiriman berkas
5	202/Pdt.G/2018/PN.Blb	10-07-2023		Pengiriman berkas
6	20/Pdt.G/2022/PN.Blb	11-07-2023	24-10-2023	
7	230/Pdt.Bth/2020/PN.Blb	04-07-2023	27-09-2023	
8	294/Pdt.G/LH/2020/PN.Blb	12-07-2023	19-10-2023	
9	142/Pdt.G/2020/PN.Blb	14-07-2023		Pengiriman berkas
10	79/Pdt.G/2021/PN.Blb	25-07-2023		Pengiriman berkas
12	19/Pdt.Plw/2021/PN.Blb	17-07-2023		Pengiriman berkas
13	113/Pdt.G/2022/PN.Blb	21-07-2023		Pengiriman berkas

14	278/Pdt.Bth/2021/PN.Blb	27-09-2023		Pengiriman berkas
15	116/Pdt.G/2022/PN.Blb	29-08-2023		Pengiriman berkas
16	135/Pdt.G/2007/PN.Blb			Pengiriman berkas
17	154/Pdt.G/2015/PN.Blb	17-11-2023		Pengiriman berkas
18	242/Pdt.G/2016/PN.Blb			
19	251/Pdt.G/2018/PN.Blb	06-11-2023		Pengiriman berkas
20	171/Pdt.P/2022/PN.Blb			BHT /PK ditolak
21	186/Pdt.G/2020/PN.Blb			
22	207/Pdt.G/2018/PN.Blb			

Tabel 2.13 : Putusan Perdata Yang Diajukan PK di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023

Putusan Pidana Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Perkara Pidana Tingkat Pertama	Tanggal		Ket
		Pengiriman Berkas PK	Pemberitahuan Putusan PK	
1.	389/Pid.Sus/2020/PN Blb	12 – 5 - 2023	13 – 10 - 2023	
2.	389/Pid.Sus/2020/PN Blb		-	
3.	576/Pid.Sus/2022/PN Blb			
4.	912/Pid.B/2022/PN Blb			
5.	913/Pid.B/2022/PN Blb			

Tabel 2.14 : Putusan Pidana Yang Diajukan PK di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023

5. KEADAAN PERKARA TINGKAT GRASI

Putusan Pidana Yang Diajukan Grasi pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Perkara Pidana Tingkat Pertama	Tanggal		Ket
		Pengiriman Berkas Grasi	Pemberitahuan Putusan Grasi	
1	NIHIL	-	-	-

Tabel 2.15 : Putusan Pidana Yang Diajukan Grasi di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Yang Diputus Selama Tahun 2023 Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A telah menangani sebanyak :

No	Nama	Sisa Perkara 2022	Perkara Masuk	Perkara Yang Diputus	Perkara Yang Diminutasi	Sisa Perkara 2023
I.	Pidana					
1.	Biasa	133	1062	995	995	200
2.	Singkat	0	0	0	0	0
3.	Cepat	0	201	201	201	0
4.	Lalu Lintas	0	19400	19400	19400	0
5.	Anak	2	25	24	24	3
II.	Perdata					
1.	Gugatan	112	335	318	318	129
2.	Permohonan	13	507	507	507	13
3.	Gugatan Sederhana	5	38	38	38	5

Tabel 2.65 : Sisa Perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Perkara yang diputus tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan tidak lebih dari 5 bulan untuk :

1. perkara pidana biasa berjumlah 1062 perkara dan perkara yang diputus lebih dari 5 bulan berjumlah 1 perkara.
2. perkara perdata berjumlah 318 perkara dan perkara yang diputus lebih dari 5 bulan berjumlah 12 perkara.

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan pk pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 yaitu :

1. perkara pidana berjumlah 960 perkara dari 995 perkara yang diputus.
2. perkara perdata berjumlah 248 perkara dari 318 perkara yang diputus.

4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Perkara perdata yang berhasil di mediasi pada Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berjumlah 7 perkara dari 291 perkara yang dimediasi.

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada Tahun 2023 terdapat 2 perkara anak yang diselesaikan melalui diversi.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. POSBAKUM

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A terwujud dalam bentuk kerjasama dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah diadakan MoU (*Memorandum of Understanding*) ini mengirimkan/menempatkan personilnya untuk melakukan piket pelayanan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di ruang yang telah disediakan, dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengadilan atau kesepakatan bersama.

Tugas dari petugas piket ini adalah melayani masyarakat dalam hal pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, dan advis hukum serta pemuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian proses berperkara.

Tahun 2023 terdapat 1 (satu) lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang membuka layanan dari hari Senin hingga Jumat. Lembaga-lembaga tersebut adalah PBH Peradi Bale Bandung

Sebagai komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan layanan masyarakat ini, diwujudkan dengan diberikannya honorarium bagi petugas POSBAKUM yang dibebankan pada DIPA eselon I Badan Peradilan Umum. Pada Tahun Anggaran 2023, anggaran yang diberikan untuk pemberian layanan POSBAKUM ini sebesar Rp. 38.400.000 (*Tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).

2. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pengadilan demi meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan, Mahkamah Agung menuntut setiap pengadilan meningkatkan akses tersebut dengan adanya sidang keliling maupun Pelayanan Terpadu. Pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, kebijakan untuk melakukan sidang keliling dipandang tidak memungkinkan sehingga keberadaan pelayanan terpadu menjadi pilihan dalam rangka peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap peradilan.

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Salah satu bentuk pemberian akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan adalah prodeo, yaitu membebaskan seluruh atau sebagian biaya perkara kepada APBN sehingga masyarakat yang memenuhi syarat tidak perlu mengeluarkan biaya perkara untuk memperoleh layanan di pengadilan.

Layanan prodeo di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A selama empat tahun terakhir belum dapat menyentuh masyarakat di wilayah hukum pengadilan. Belum ada masyarakat yang mengajukan untuk mendapatkan layanan ini. Masih dilakukan evaluasi kebijakan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A terhadap prodeo baik dari sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya prodeo maupun terhadap kesadaran masyarakat untuk mendapatkan layanan ini.

Tahun Anggaran 2023 DIPA Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tidak memperoleh alokasi anggaran untuk jenis layanan Pembebasan Biaya Perkara ini, sehingga selama Tahun 2023 tidak terdapat kegiatan yang berhubungan dengan pembebasan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan layanan ini.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

1. SUMBER DAYA MANUSIA DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

Untuk melihat komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, kami mencoba membuat data statistik keadaan SDM pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023, sebagai berikut:

No	Jabatan PNS	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		Keterangan
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	KETUA							1		
2	WAKIL KETUA							1		
3	HAKIM							12	5	
4	PANITERA							1		
5	SEKRETARIS							1		
6	PANMUD PIDANA							1		
7	PANMUD PERDATA									
8	PANMUD HUKUM					1				
9	KASUBBAG PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN					1				
10	KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA					1				
11	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN					1				
12	PANITERA PENGGANTI					13	7		1	
13	PRANATA KOMPUTER									
14	JURUSITA					3				
15	JURUSITA PENGGANTI			1	1	4	3			
16	STAF KEPANITERAAN PIDANA									
17	STAF KEPANITERAAN PERDATA				1	2				
18	STAF KEPANITERAAN HUKUM	1								
19	STAF SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN				2					
20	STAF SUB BAG KEPEGAWAIAN, ORTALA			1						
21	STAF SUB BAG PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN									
TOTAL		1		2	4	26	10	17	6	
No	Jabatan PPPK	Gol VII								Keterangan
		L	P							

1	STAF SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN	1		PPPK
---	--------------------------------	---	--	------

Tabel 3.1 : Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Berdasar Jabatan

No	Pangkat PNS	Laki-laki	Perempuan	Keterangan
1	Pembina Utama (IV/e)	-	-	
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	2	-	
3	Pembina Utama Muda (IV c)	-	-	
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	12	4	
5	Pembina (IV/a)	3	2	
6	Penata Tingkat I (III/d)	13	8	
7	Penata (III/c)	5	1	
8	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4	3	
9	Penata Muda (III/a)	2	-	
10	Pengatur Tingkat (II/d)	-	-	
11	Pengatur (II/c)	1	4	
12	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1	-	
13	Pengatur Muda (II/a)	-	-	
14	Juru Tingkat I (I/d)	-	-	
15	Juru (I/c)	1	-	
16	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-	-	
17	Juru Muda (I/a)	-	-	
	Total	44	22	
No	Pangkat PPPK	Laki-laki	Perempuan	Keterangan
1	VII	1	-	PPPK

Tabel 3.2 : Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Berdasar Kepangkatan

2. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK GOLONGAN

No	Golongan/Ruang PNS	Laki-laki	Perempuan	Keterangan
1	IV/a	3	2	
	IV/b	12	4	
	IV/c	-	-	
	IV/d	2	-	
2	III/a	2	-	
	III/b	4	3	
	III/c	5	1	
	III/d	13	8	
3	II/a	-	-	
	II/b	1	-	
	II/c	1	4	
	II/d	-	-	
4	I/a	-	-	

	I/b	-	-	
	I/c	1	-	
	I/d	-	-	
No	Golongan/Ruang PPPK	Laki-laki	Perempuan	Keterangan
1	VII	1	-	

Tabel 3.3 : Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Berdasar Golongan/Ruang

3. SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KELOMPOK PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		Keterangan
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	S3	-	-	-	-	-	-	1	1	
2	S2	-	-	-	-	3	-	12	3	
3	S1	-	-	-	-	17	10	4	2	
4	D3	-	-	2	3	1	-	-	-	
5	SMA	-	-	1	1	3	2	-	-	
6	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	SD	1	-	-	-	-	-	-	-	
Total		1	-	3	4	24	12	17	6	

Tabel 3.4 : Statistik Pegawai Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Berdasar Pendidikan

A. MUTASI

Mutasi Hakim dan Pegawai masuk maupun keluar yang terjadi pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A adalah sebagai berikut :

a. Mutasi Masuk

No.	Nama	Asal	Tanggal	Jabatan
1	FIRLANA TRISNILA, S.H.	Mahkamah Agung	03/04/2023	Hakim
2	AMBO MASSE, S.H., M.H.	PN Bekasi	02/05/2023	Hakim
3	HENY FARIDHA, S.H., M.H.	PN Majalengka	02/05/2023	Hakim
4	GANJAR RAHARDIANSAH, S.H.	PN Garut	17/05/2023	Panitera Pengganti
5	YODA SURYAPRINGGA, A.Md.	PN Batam	23/02/2023	Arsiparis

Tabel 3.5 : Mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

b. Mutasi Keluar

No.	Nama	Tujuan	Tanggal	Jabatan
1	NURHAYATI NASUTION, SH., MH.	PN. Surakarta	24-11-2023	Hakim
2	DAME PARULIAN PANDIANGAN, S.H.	PN. Semarang	01-12-2023	Hakim
3	NANA RUSMANA, SH.,MH.	PN. Surakarta	03-02-2023	Sekretaris
4	SUPARNO, S.H.	PN. Bandung	13-06-2023	Panitera Muda Perdata

5	ZENAL MUTTAKIN, SH., MH	PN Karawang	26-05-2023	Panitera Pengganti
6	RIZKA SETIAWAN, S.H	PN. Bandung	11-08-2023	Analisis Perkara Peradilan
7	ALDI REINALDI, ST.	PN. Bekasi	02-11-2023	Pranata Komputer

Tabel 3.6 : Mutasi keluar dari Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

B. PROMOSI

No.	Nama	Jabatan	Promosi	Nomor Surat Keputusan / tanggal
1	NURHAYATI NASUTION, SH., MH.	Hakim PN Bale Bandung Kelas 1A	Hakim PN Surakarta Kelas 1A Khusus	No. 1789/DJU/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 24/10/2023
2	DAME PARULIAN PANDIANGA N, S.H.	Hakim PN Bale Bandung Kelas 1A	Hakim PN Semarang Kelas 1A Khusus	No. 1789/DJU/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 24/10/2023
3	NANA RUSMANA, SH.,MH.	Sekretaris PN Bale Bandung Kelas 1A	Sekretaris PN Surakarta Kelas 1A Khusus	No. 11/SEK/Kp.I/SK/I/2023 tanggal 13/01/2023
4	SUPARNO, S.H.	Panitera Muda Perdata PN Bale Bandung Kelas 1A	Panitera Muda Perdata PN Bandung Kelas 1A Khusus	No. 1331/DJU/SK/KP04.5/4/2023 tanggal 17/04/2023
5	ZENAL MUTTAKIN, SH., MH	Juru Sita PN Bale Bandung Kelas 1A	Panitera Pengganti PN Karawang Kelas 1B	No. 1331/DJU/SK/KP04.5/4/2023 tanggal 17/04/2023
6	RIZKA SETIAWAN, S.H	Analisis Perkara Peradilan PN Bale Bandung Kelas 1A	Analisis Perkara Peradilan PN Bandung Kelas 1A Khusus	No. W11.U/ 151 /KP.04.5/7/2023 tanggal 20/07/2023
7	ALDI REINALDI, ST.	Pranata Komputer PN Bale Bandung Kelas 1A	Pranata Komputer PN Bekasi Kelas 1A Khusus	No. 1549/SEK/SK.KP4.1.3/X/2023 tanggal 06/10/2023

Tabel 3.7 : Data Promosi Jabatan Pegawai

C. PENSUN

Adapun Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memasuki masa pensiun pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Tanggal pensiun
-----	------	---------	-----------------

1.	SUTARNI	Juru Sita Pengganti	01-02-2023
2.	WAWAN MIHARNA	Administrasi Perkara	01-03-2023

Tabel 3.8 : Data Pegawai Negeri Sipil Yang Pensiun

D. DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Diklat teknis maupun non-teknis yang diikuti oleh pimpinan dan pegawai Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 sebagai berikut

No	Nama Peserta Diklat	Jabatan	Jenis Diklat
1	ACHMAD SATIBI, S.H., M.H.	Ketua	Teknis
2	DR. H. AHMAD SYAFIQ, S.Ag., S.H., M.H.	Wakil Ketua	Teknis
3	NENNY EKAWATY BARUS, S.H.,M.H.	Hakim	Teknis
4	KUSMAN, SH., MH.	Hakim	Teknis
5	SYIHABUDDIN, S.H., M.H.	Hakim	Teknis
6	MAJU PURBA, SH	Hakim	Teknis
7	SAUT ERWIN HARTONO A. MUNTHE, S.H., M.H.	Hakim	Teknis
8	TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H.	Hakim	Teknis
9	TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H.	Hakim	Teknis
10	DWI SUGIANTO, S.H.	Hakim	Teknis
11	JASAEL, S.H.,M.H.	Hakim	Teknis
12	HENY FARIDHA, S.H., M.H.	Hakim	Teknis
13	IDI IL AMIN, S.H., M.H.	Hakim	Teknis
14	SUDRAJAT, S.E., M.M.	Sekretaris	Non Teknis
15	MAMOK ANDRI SENUBEKTI, S.Kom., M.Kom.	Plt. Sekretaris / Kasub.Bag PTIP	Non Teknis
16	YENNY IMELDA BUTAR BUTAR, SE.	Kasub.Bag Umum dan Keuangan	Non Teknis
17	FAUZIAH DISTI HASANAWATI, SH	Kasub.Bag Kepegawaian, Ortala	Non Teknis
18	MARTUA FERNANDO MANURUNG, S.H.	Panitera Pengganti	Teknis
19	ADITYA RIZKY FADHILAH, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Teknis
20	ADITYA RIZKY FADHILAH, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Non Teknis
21	HARIANI K. SITUMORANG, A.Md.Ak	Pengelola BMN	Non Teknis
22	HARRIS HARYADI, A.Md.	Arsiparis	Non Teknis

Tabel 3.8 : Data Pegawai Negeri Sipil Yang Diklat

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran pelaksanaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan keuangan serta sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya. Anggaran tertuang dalam DIPA dan RKA-KL / POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). Ada 2 (dua) DIPA/POK pada satan kerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, yaitu DIPA 005.01 untuk eselon 1 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 005.03 untuk eselon 1 Badan Peradilan Umum. Tahun Anggaran 2023 alokasi untuk masing-masing DIPA adalah:

- a. DIPA005.01 (Badan Urusan Administrasi) sebesar Rp 13.915.398.000 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- b. DIPA005.03 (Badan Peradilan Umum) sebesar Rp 271.500.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

1. REALISASI DIPA 01

Pelaksanaan DIPA tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. DIPA 005.01 (*Badan Urusan Administrasi*) yaitu sebesar Rp 13.768.835.000 (*Tiga belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tigapuluh lima ribu Rupiah*) terperinci untuk mencapai output program kegiatan yang telah ditentukan.
- b. Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja :

No	Kelompok belanja	Jumlah
1	Belanja Pegawai (51)	Rp. 11.739.555.000
2	Belanja Barang (52)	Rp. 1.931.236.000
3	Belanja Modal (53)	Rp. 239.000.000
4	Belanja Non-Operasional	Rp. 5.607.000

- c. Rincian DIPA Berdasarkan Program/Kegiatan:

No	Program/Kegiatan/output	Jumlah
----	-------------------------	--------

005.01.01 [Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung]	
1066 [Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi]	
Layanan Perkantoran	
A. Gaji dan Tunjangan	Rp. 11.739.555.000
B. Operasional dan pemeliharaan kantor	Rp. 1.931.236.000
005.01.02 [Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung]	
1071 [Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung]	
Layanan internal pengadaan sarana dan prasarana	Rp. 239.000.000
Non-Operasional	Rp. 5.607.000

Dalam perjalanannya, DIPA 005.01 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 01:

No	Jenis revisi	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Revisi DIPA ke-1	20-02-2023	
2	Revisi DIPA ke-2	17-04-2023	
3	Revisi DIPA ke-3	12-07-2023	
4	Revisi DIPA ke-4	11-08-2023	
5	Revisi DIPA ke-5	03-09-2023	
6	Revisi DIPA ke-6	23-10-2023	
7	Revisi DIPA ke-7	23-11-2023	

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 untuk DIPA 005.01 Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A adalah sebesar Rp. 13.915.398.000 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	TA 2022			TA 2023		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
				.			.

1	Gaji dan Tunjangan	11.254.392.00 0	11.160.637.932	99.17	11.739.555.000	10.841.545.021	92.35
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.006.934.000	1.936.181.926	97.82	1.931.236.000	1.813.846.597	99.47
3	Layanan internal pengadaan sarana dan prasarana	502.500.000	502.391.392	99.98	239.000.000	238.844.068	99.93
4	Non-Operasional	-	-	-	5.607.000	5.595.000	99.79
Total Realisasi(%)		99.00			93.47		

Tabel perbandingan realisasi anggaran TA 2022 dan TA 2023

2. REALISASI DIPA 03

- a. DIPA 005.03 (Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum) yaitu sebesar Rp 271.500.000 terperinci untuk mencapai output program kegiatan yang telah ditentukan.
- b. Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja :

No	Kelompok belanja	Jumlah
1	Belanja Barang	Rp. 271.500.000

- c. Rincian DIPA Berdasarkan Program/Kegiatan:

No	Program/Kegiatan/output	Jumlah
1	1049.QBA Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp. 38.400.000
2	1049.BCA Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	Rp. 231.600.000
3	1049.AEA Koordinasi	Rp. 1.500.000

Dalam perjalanannya, DIPA 005.03 mengalami beberapa kali revisi. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dan mengoptimalkan pelaksanaan DIPA. Berikut adalah revisi yang dilakukan terhadap DIPA 03:

No	Jenis revisi	Tanggal Pengesahan	Keterangan
1	Revisi DIPA ke-1	15-04-2023	
2	Revisi DIPA ke-2	18-04-2023	
3	Revisi DIPA ke-3	12-07-2023	
4	Revisi DIPA ke-4	12-10-2023	
5	Revisi DIPA ke-5	24-11-2023	

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 untuk DIPA 005.03 Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A adalah sebesar Rp. 271.500.000 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	TA2022			TA2023		
		Pagu	Realisasi	%.	Pagu	Realisasi	%.
	Belanja Barang	293.890.000	292.745.991	99,61	271.500.000	270.008.289	99,45
Total Realisasi(%)		99,61			99,45		

Tabel perbandingan realisasi anggaran TA 2022 dan TA 2023

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

a. Sarana Dan Prasarana Gedung

Sarana dan prasarana gedung meliputi pengelolaan aset tetap barang milik Negara yang terdiri dari tanah, gedung bangunan kantor permanen, dan rumah negara permanen.

Tanah pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A telah bersertifikat a.n. Pemerintah RI c.q Mahkamah Agung RI sejak (bulan/tahun) Maret 2014. Berikut adalah data tanah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A :

No	Uraian	Lokasi	Sertifikat		Luas (M2)
			Nomor	Tanggal	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Bale Endah	SHP No. 10 a.n. Pemerintah RI c.q. MA	10/10/1990	5.885
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	Bale Endah	SHP No. 13 a.n.	22/1/1991	300

			<i>Pemerintah RI cq. MA</i>		
3	<i>Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I</i>	Bale Endah	<i>SHP No. 14 a.n. Pemerintah RI cq. MA</i>	10/10/1990	300
4	<i>Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I</i>	Bale Endah	<i>SHP No. 15 a.n. Pemerintah RI cq. MA</i>	22/1/1991	543
5	<i>Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I</i>	Bale Endah	<i>SHP No. 12 a.n. Pemerintah RI cq. MA</i>	10/10/1990	642
6	<i>Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I</i>	Bale Endah	<i>SHP No. 11 a.n. Pemerintah RI cq. MA</i>	22/1/1991	1.530
Jumlah					9201

Tabel data tanah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A

Berikut adalah data bangunan dan pemanfaatan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A :

Nama Barang	Luas	Tahun Perolehan	Kondisi	Pemanfaatan
<u>Bangunan Gedung Kantor Permanen</u>	<u>199</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Bangunan Gedung Kantor Permanen</u>	<u>300</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Bangunan Gedung Kantor Permanen</u>	<u>400</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Bangunan Gedung Kantor Permanen</u>	<u>49</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Bangunan Gedung Kantor Permanen</u>	<u>624</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>

<u>Bangunan Gedung Kantor Permanen</u>	<u>600</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen</u>	<u>70</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen</u>	<u>70</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen</u>	<u>70</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen</u>	<u>70</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen</u>	<u>70</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen</u>	<u>70</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen</u>	<u>70</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen</u>	<u>70</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen</u>	<u>70</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen</u>	<u>70</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen</u>	<u>70</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen</u>	<u>70</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>
<u>Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen</u>	<u>70</u>	<u>2004</u>	<u>Baik</u>	<u>Dimanfaatkan</u>

Tabel data bangunan dan pemanfaatan

Jenis-jenis pengelolaan tanah dan bangunan diantaranya adalah pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan. Berikut adalah data Pengelolaan Tanah dan Bangunan Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 :

No	Jenis pengelolaan	Uraian/jenis barang	Jumlah	Keterangan
1	Pemanfaatan/Sewa	Sewa rumah dinas	11	Hakim

Tabel pengelolaan tanah dan bangunan

b. Sarana Dan Prasarana Fasilitas Peralatan Dan Mesin

Sarana dan prasarana fasilitas peralatan dan mesin meliputi pengelolaan aset Barang Milik Negara yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris/perabot kantor. Selama Tahun 2023 sampai tanggal 29 Desember 2023 terdapat penambahan sarana dan prasarana fasilitas peralatan dan mesin.

Berikut adalah daftar pengelolaan sarana prasarana berupa Peralatan dan Mesin:

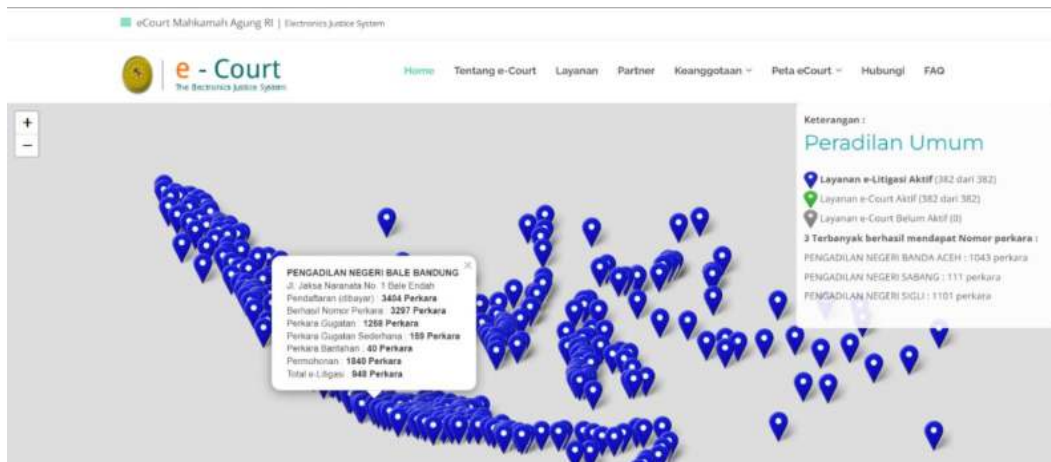
No	Jenis pengelolaan	Uraian/jenis barang	Jumlah	Keterangan
1	Pengadaan	AC 0.5 PK	1 UNIT	e-Katalog
2	Pengadaan	AC Standing 5 PK	1 UNIT	e-Katalog
3	Pengadaan	Pengadaan Meubelair Ruang Sidang	1 KEG	Pengadaan Langsung

Tabel pengelolaan peralatan dan mesin

C. TEKNOLOGI INFORMASI DAN LAYANAN PUBLIK

1. Implementasi e-court di Pengadilan Negeri Bale Bandung

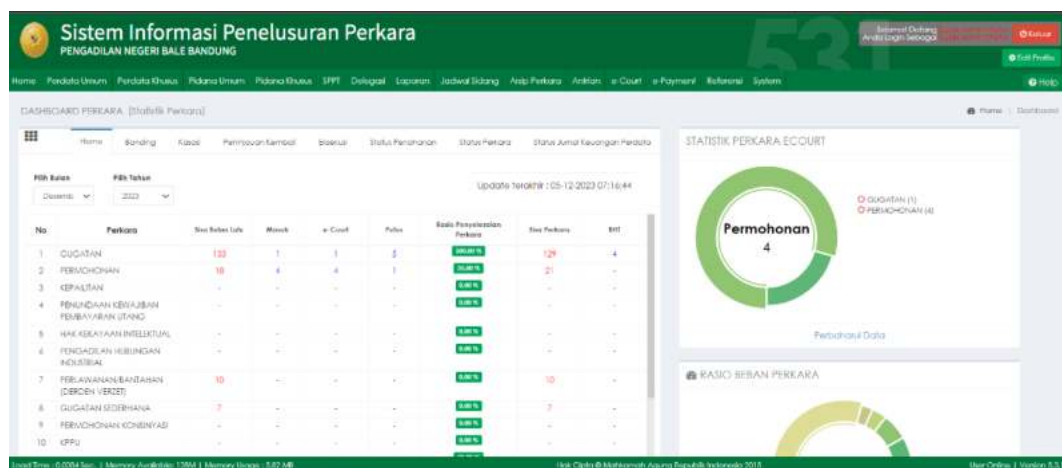
Pengadilan Negeri Bale Bandung sampai tanggal 29 Desember 2023 sudah mendaftarkan dan mengimplementasikan e-court yaitu perkara Gugatan sebanyak 318 Perkara, perkara Gugatan Sederhana sebanyak 42 perkara, perkara Permohonan sebanyak 547 perkara dengan proses e-Litigasi sebanyak 90 perkara.



Gambar peta e-Court PN Bale Bandung Kelas 1A

2. Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Bale Bandung

Hingga saat ini aplikasi SIPP telah menjadi bagian dari proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Aplikasi SIPP Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A selalu menyesuaikan dengan versi yang terbaru.



Gambar Aplikasi SIPP PN Bale Bandung Kelas 1A

Saat ini Aplikasi SIPP menggunakan versi 5.3.1 dengan perbaikan dan penambahan menu sebagai berikut :

No	Versi	Deskripsi
1	5.3.1	Umum, Agama dan TUN : Perbaikan pada Perekaman Data Putusan Verzet
2	5.3.1	Umum, Agama dan TUN : Perbaikan pada fitur Verifikasi Prodeo
3	5.3.1	Umum, Agama dan TUN : Perbaikan pada fitur Laporan Perkara Hakim (tidak menampilkan nama Hakim yang tidak aktif)

4	5.3.1	Umum, Agama dan TUN : Optimasi penyajian data pada fitur Jurnal Keuangan Perkara
5	5.3.1	Umum dan Mahkamah Syarriyah : Perbaikan pada fitur Sinkronisasi Data e-Berpadu dengan SIPP
6	5.3.1	Umum dan Agama : Perbaikan pada penyajian data di Halaman Tab Eksekusi
7	5.3.1	Umum : Perbaikan pada Perekaman Data Minutasi Perkara PHI dengan Nilai Sengketa di Bawah 150 Juta
8	5.3.1	Umum : Penambahan Data Referensi Satuan Kerja BNN dan KPK pada fitur Referensi Penyidik
9	5.3.1	Umum : Perbaikan pada Penomoran Perkara Eksekusi Perkara PHI
10	5.3.1	Umum : Perbaikan pada fitur Riwayat Penahanan
11	5.3.1	Agama : Perbaikan pada perekaman data Izin Cerai pada Tab Data Umum
12	5.3.1	Agama : Perbaikan pada fitur perekaman data Putusan Perkara Pra Pidana Jinayat
13	5.3.1	Agama : Perbaikan pada perekaman data Alasan Dispensasi Kawin pada Tab Data Umum

Tabel Catatan Pembaharuan SIPP



Gambar Aplikasi MIS PN Bale Bandung Kelas 1A

Saat ini Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP) menggunakan versi 2.4, para user SIPP di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A terbantu untuk membenarkan data pada SIPP. Aplikasi MIS

ini hanya merupakan alat bantu untuk memantau kelengkapan data SIPP, juga sebagai bahan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan terkait percepatan proses penyelesaian perkara kedepan dengan tetap berpijak pada kaidah-kadah hukum dan keadilan serta perbaikan pencatatan administrasi perkara melalui SIPP.

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A menjunjung tinggi pelayanan prima terhadap stakeholder dan para pengunjung yang datang dengan mengedepankan prinsip Senyum Salam Sapa (3R) dan Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin (5R). sehingga tahun 2023 adalah tahun yang enam kalinya PN. Bandung Kelas 1A mempertahankan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI dengan mendapatkan predikat nilai excellent.

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A berdasar kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 dimana Pengadilan Negeri Bale Bandung termasuk Pengadilan pertama yang memperoleh penghargaan Akreditasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Ada beberapa manfaat penerapan sistem akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri diantaranya:

- Zero waste yang berarti mengurangi biaya dan efisiensi meningkat.
- Zero injury yang berarti keselamatan kerja lebih baik.
- Zero breakdown yang berarti pemeliharaan lebih baik.
- Zero defect yang berarti kualitas lebih baik.
- Zero set up time yang berarti tidak ada waktu yang terbuang.
- Zero late delivery yang berarti dapat memenuhi permintaan pencari keadilan tepat waktu.
- Zero customer claim yang berarti pelanggan menaruh tingkat kepercayaan yang tinggi.
- Zero defisit yang berarti Pengadilan akan lebih maju

Penerapan sistem akreditasi penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A menuntut perbaikan secara bertahap untuk bermigrasi dari sistem manual birokratis menuju sistem yang lebih sederhana namun memberikan manfaat secara holistic. Untuk itulah setiap Pengadilan berusaha maksimal mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam mengejawantahkan program yang telah direncanakan dalam cetak biru Mahkamah Agung Republik Indonesia.


Perkembangan teknologi saat ini telah menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan Teknologi Informasi (TI). Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi semangat jaman (geist) yang tak terbandung. Satu hal yang patut

dicatat, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kemudahan akses, dan sebagaimana akan sangat sulit diimplementasikan dalam tugas sehari-harinya bila tanpa mengadopsi kemajuan IT dan memanfaatkannya di dalam penerapan kerja.

Akreditasi Penjaminan Mutu terbagi dalam dua garis besar pelayanan yaitu utama dan pendukung, dimana pelayanan utama menitikberatkan pada core bisnis peradilan yang berhubungan dengan teknis perkara, sedangkan pelayanan pendukung bersifat non teknis biasanya berhubungan dengan kegiatan kesekretariatan, lingkungan kerja dan cara kerja para aparatur pengadilan.

Dalam hal implementasi pelayanan utama dan pendukung akreditasi penjaminan mutu, Pengadilan Negeri Bale Bandung mampu menjadi pionir di Jawa Barat dan termasuk Pengadilan Negeri generasi pertama bersama beberapa Pengadilan Negeri lainnya se-Indonesia yang berhasil meraih predikat excellent.

Setelah mendapatkan penilaian excellent pada akreditasi pertama, PN. Bale Bandung Kelas 1A kembali meraih predikat excellent dalam 2 kali surveilans Akreditasi Penjaminan Mutu. Pada Tahun 2022 PN Bale Bandung berhasil meraih predikat A, seperti terlihat pada lampiran di bawah ini.



**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS DAN IA
TAHUN 2022**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS
DAN IA TAHUN 2022.

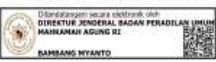
KESATU : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi,
Pengadilan Negeri kelas IA Khusus dan IA berdasarkan rapat
Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagaimana terlampir
dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


PETIHAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang
berangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022



MAHARAH AGUNG RI
BAMBANG MYANTO


Kepada :
Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung




UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh

PETIHAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022
TANGGAL 9 DESEMBER 2022

NO.	NAMA PENGADILAN	TIPE	NILAI AKREDITASI 2021	NILAI AKREDITASI 2022	PREDIKAT
1 c/d 50	dtt.				
59	Pengadilan Negeri Bale Bandung	IA	730	725	A
60 c/d 98	dtt.				



MAHARAH AGUNG RI
BAMBANG MYANTO



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan menempatkan pegawai-pegawai yang kompeten untuk ditempatkan di satu titik pelayanan sebagai tempat masuk dan keluarnya layanan peradilan. Sehingga masyarakat hanya berhenti di satu pintu layanan saja. Layanan satu pintu Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A menempatkan wakil dari masing-masing kepaniteraan perdata, pidana dan hukum untuk melayani pengunjung pengadilan serta petugas e-court untuk melayani di meja e-court .

Pelayanan terpadu satu pintu pengadilan Negeri Bale Bandung menerapkan layanan virtual yaitu para pengunjung Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tidak bertatap langsung dengan petugas layanan guna menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.



Pengadilan Negeri Bale Bandung juga menyediakan layanan PTSP secara online yang dapat diakses melalui WhatsApp dan Zoom.

PTSP ONLINE
MELALUI ZOOM MEETING
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG KELAS 1A

- Informasi Pendaftaran dan Administrasi Perkara
- Informasi Proses Persidangan
- Pendaftaran Akun E-Court Non Advokat
- Pengambilan Produk Pengadilan (melalui Inovasi Mang Bolin/Jasa Antar Langsung Via Pos)
- Layanan Pengaduan

MEETING ID : 885 643 0366
PASSWORD : ptspbale

— Cukup dari Rumah, Layanan PTSP Berada di genggaman Anda — Aksesnya mudah, Cepat, dan Murah —

C. INOVASI PELAYAN PUBLIK

Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi; merupakan inovasi yang terus berkembang demi melayani kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan akan informasi.

A. Mengembangkan website Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di www.pn-balebandung.go.id;

B. Inovasi Notifikasi menggunakan Telegram

**PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
KELAS 1A**

Saya Kang Adil...
Siap Melayani Masyarakat, Semua Mengenai
Informasi Seputar Pelayanan Pengadilan :
- Kepaniteraan Hukum, Pidana, Perdata
- Informasi Denda Tilang
- Informasi Lainnya....

Caranya adalah :

1. Buka Playstore /Appstore.
2. Install Telegram.
3. Add/Search @pnbalebandung (bot).
4. Klik "Start Chat"
5. Untuk Informasi Aplikasi ketik "/bantuan"
6. Atau bisa ke : https://t.me/pnbalebandung_bot

Alamat : Jl. Jaksanaranata No.1
Bale Endah, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat 40375

Contact us :
<https://www.pn-balebandung.go.id/>
Telepon/Fax : 022-5940791, 022-5940870

C. Inovasi Fitur Website Kemudahan bagi disabilitas dalam mengakses website

Selamat Datang | Website Pengad... Tab Baru

pn-balebandung.go.id/

Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
Jaksanaranata No.1 Bale Endah, Kab. Bandung, Jawa Barat 40375
Telp. (022) 5940791, (022) 5940870
pn.balebandung@gmail.com

W3C 12

Depan Tentang Pengadilan Layanan Publik Layanan Hukum Berita Hubung Kami

Hari Guru Nasional Ke-75 Desember 2020

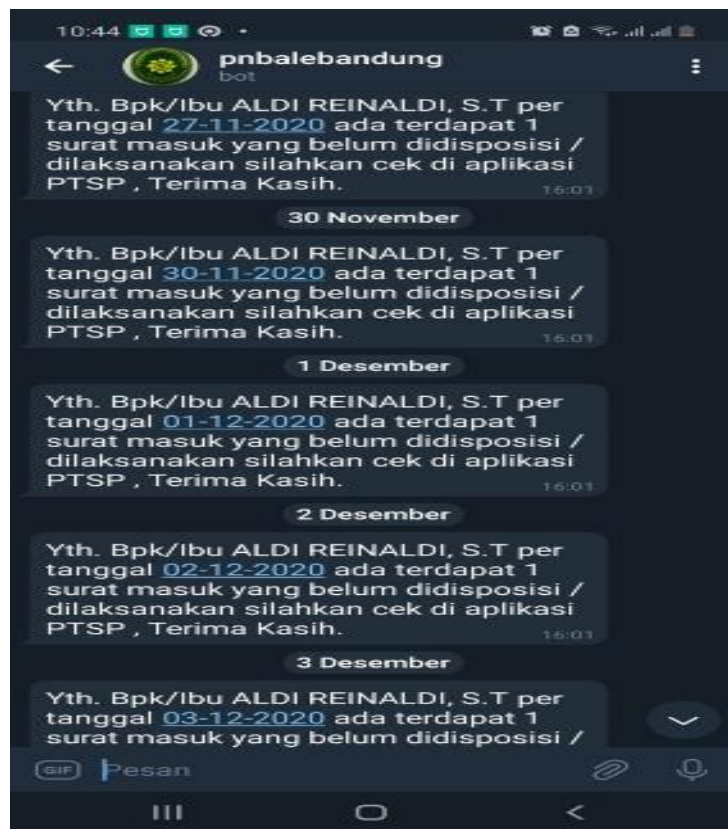
Hari Guru Nasional Ke-75 Tahun 2020 ini, yaitu "Bangkitkan dan Merdeka Belajar".

adally

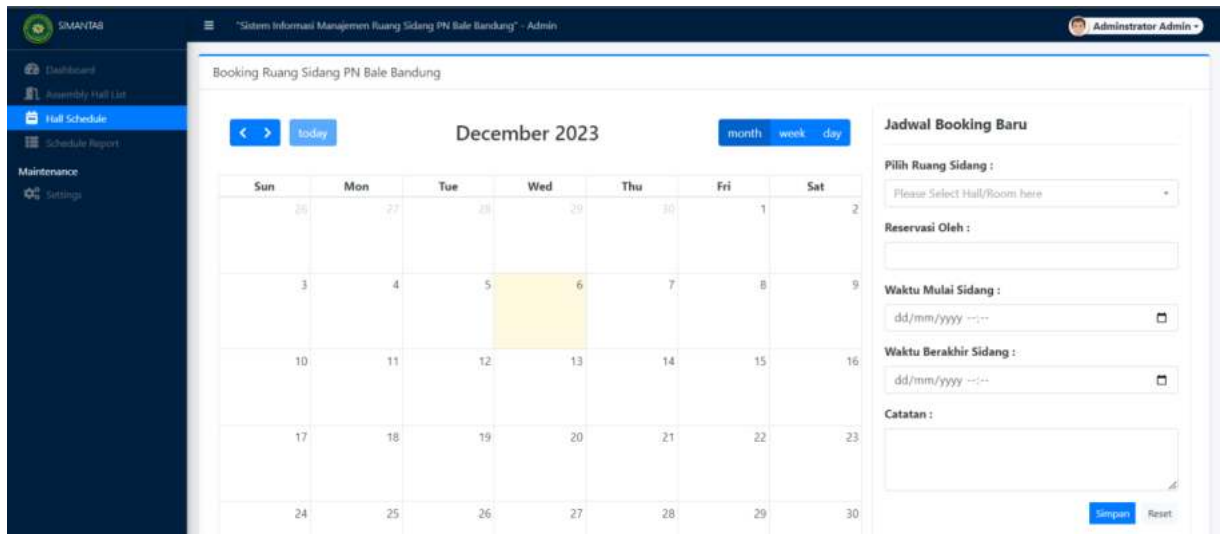
D. Menyiapkan informasi elektronik dan brosur tentang informasi E-court;



E. Inovasi Layanan Internal untuk pegawai demi meningkatkan Kinerja pegawai;



F. Inovasi Sistem Informasi Manajemen Ruang Sidang PN Bale Bandung (SIMANTAB);



BAB VI PENGAWASAN DAN PENGADUAN

A. INTERNAL

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional :

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan refresif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan. Guna mendukung pengawasan melekat, maka Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A telah melakukan metode pengawasan internal yaitu :
 - a. Terbitnya SK Ketua Nomor W11-U6/4739/KP.04.6/7/2023 Tanggal 13 Juli 2023 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang. Pengawasan tiap bidang dilakukan setiap bulannya oleh Hakim Pengawas Bidang. Hakim pengawas bidang telah melaksanakan tugasnya dengan membuat laporan pengawasan yang disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A selaku koordinator Pengawas Bidang dan kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.
 - b. Pertemuan secara berkala setiap bulan sekali diperuntukkan bagi seluruh pegawai dan hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A diperlukan untuk mendapatkan informasi kendala-kendala apa saja yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.
2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukkan untuk itu. Selama Tahun 2023, di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A telah dilaksanakan pengawasan Internal dalam Bentuk Pengawasan Fungsional sekaligus melekat. Berikut Pengawasan yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di Tahun 2023 :
 - a. Pengawasan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Oktober 2023
 - b. Pemeriksaan Zona Integritas oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Oktober 2023

B. EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan dan pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023 yang kami susun ini kami simpulkan mengenai beberapa hal diantaranya ialah :

- Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A telah berupaya secara maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat pencari keadilan dengan ketersediaan SDM yang dimiliki .
- Dengan adanya Reformasi Birokrasi Dunia Peradilan, maka dunia peradilan harus segera memperbaiki kinerja dan berfikir serta bertindak sesuai VISI DAN MISI yang telah ditetapkan untuk menuju Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.
- Pengawasan Internal pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A telah diupayakan untuk menjamin pelaksanaan tugas administrasi Perkara maupun administrasi umum;
- Pelaksanaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik meskipun demikian guna mengeliminir terjadinya kesalahan harus dilakukan pengawasan secara berkala.
- Dengan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan tupoksinya menyebabkan sering adanya penumpukan pada suatu pekerjaan sehingga terkadang pekerjaan yang merupakan tupoksi utama pegawai tersebut menjadi tertunda.
- Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sangat kekurangan pegawai, maupun untuk staf, yang menyebabkan tidak maksimalnya kinerja SDM yang ada.

B. REKOMENDASI

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023 yang kami susun dan dari kesimpulan yang ada, maka beberapa rekomendasi demi tercapainya visi dan misi Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A:

- Terkait pengelolaan pegawai supaya dapat ditambah staf administrasi baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan mengingat banyaknya staf yang purnabakti dan promosi;
- Terkait pengelolaan perkara, diharapkan supaya ada petunjuk tentang langkah-langkah menghadapi akhir tahun berkaitan dengan penyelesaian perkara yang sedang ditangani pada tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai target meminimalisasi sisa perkara pada setiap akhir tahun.

- Mengingat kebutuhan ruangan yang semakin banyak, sedangkan ruang yang ada sangat terbatas dan sebagian gedung Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A masih menggunakan spesifikasi gedung lama, maka mohon agar berikan belanja untuk rehab berat/membangun ulang gedung bagian ruang PTSP untuk disesuaikan dengan peraturan penataan ruang PTSP yang baru.

Demikian Laporan Tahunan tahun 2023 ini kami buat sebagai visualisasi pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A selama tahun 2023. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua pihak dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A. Tentunya dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detail namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan harapan tahun mendatang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan pada masa yang akan datang.